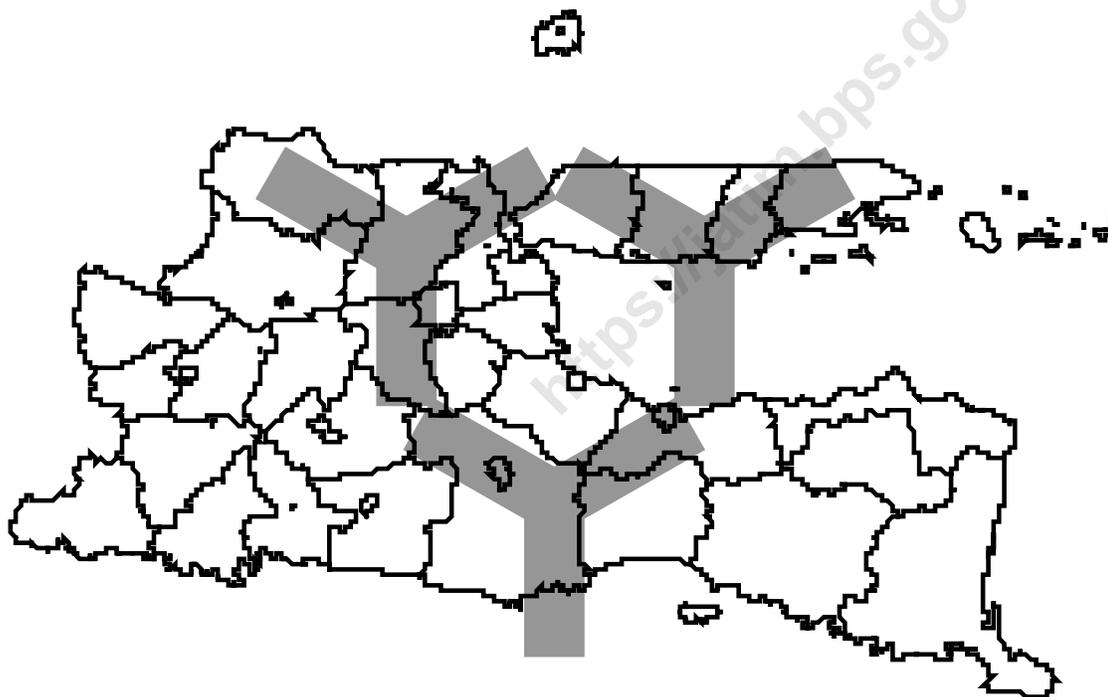




Katalog BPS 9218.35

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TIMUR

**Kabupaten/Kota
Se Jawa Timur
2000 - 2005**



**Kerjasama
Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan
BAPPEPROP Jawa Timur**

November 2006

KATA PENGANTAR

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota semakin penting dirasakan manfaatnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah. Biasanya dimanfaatkan bukan hanya oleh pemerintah dengan berbagai jajarannya, tetapi juga oleh masyarakat akademis dan peneliti sosial dan ekonomi, yang sekarang sudah mulai banyak dilakukan oleh swasta. Mengingat pentingnya data tersebut, BPS Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur (BAPPEPROP) setiap tahun menyajikannya dalam bentuk publikasi terbatas.

Dalam Publikasi ini angka PDRB yang disajikan adalah PDRB Kabupaten/Kota, baik menurut perhitungan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. Selain dalam nilai nominal, untuk memudahkan pengguna data, disajikan pula angka-angka dalam bentuk persentase, indeks, dan hasil olahan lainnya.

Kami sadari bahwa penghitungan dan penyajian PDRB Kabupaten / Kota ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu saran dan kritik konstruktif, untuk meningkatkan mutu penghitungan dan penyajian PDRB pada masa mendatang, dari para pengguna data, sangat kami harapkan. Terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini, terutama kepada para kontributor data dari instansi pemerintah maupun swasta.

Akhirnya, semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan data untuk keperluan evaluasi dan perencanaan pembangunan oleh berbagai pihak, terutama Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Surabaya, Nopember 2006

KEPALA BPS PROPINSI JAWA TIMUR

D J A M A L, SE, M.Sc.
NIP. 340 004 373

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran	vi
I. KONSEP DAN DEFINISI.....	1
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
2. Publikasi	1
3. Konsep dan Definisi	2
4. Metode Penghitungan	2
5. Klasifikasi Lapangan Usaha	4
6. Survei Khusus Pendapatan Regional	4
7. Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan	5
II. URAIAN SEKTORAL	8
2.1 Sektor Pertanian	8
2.1.1 Tanaman Bahan makanan	8
2.1.2 Tanaman Perkebunan	8
2.1.3 Peternakan dan Hasil-hasilnya	9
2.1.4 Kehutanan	10
2.1.5 Perikanan	10
2.2 Sektor Pertambangan dan Penggalan	11
2.3 Sektor Industri Pengolahan	11
2.4 Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih	12
2.4.1 Listrik	12
2.4.2 Gas	13
2.4.3 Air Bersih	13
2.5 Sektor Bangunan	13
2.6 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13
2.6.1 Perdagangan Besar dan Eceran	13
2.6.2 Hotel	14

2.6.3 Restoran	15
2.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	15
2.7.1 Angkutan Kereta Api	15
2.7.2 Angkutan Jalan Raya	15
2.7.3 Angkutan Laut/Air	16
2.7.4 Angkutan Udara	16
2.7.5 Jasa Penunjang Angkutan	16
2.7.6 Komunikasi	18
2.8 Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	19
2.8.1 Bank	19
2.8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	20
2.8.3 Jasa Penunjang Keuangan	20
2.8.4 Sewa Bangunan	20
2.8.5 Jasa Perusahaan	21
2.9 Sektor Jasa-jasa	21
2.9.1 Jasa Pemerintahan Umum	21
2.9.2 Jasa Sosial dan Kemasyarakatan	22
2.9.3 Jasa Hiburan dan Kebudayaan	24
2.9.4 Jasa Perorangan dan Rumahtangga	24
III. RINGKASAN HASIL PENGHITUNGAN PDRB KABUPATEN / KOTA SE JAWA TIMUR	25
3.1 PDRB Antar Kabupaten / Kota	25
3.2 Struktur / Komposisi Ekonomi	28
3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota	38
3.4 PDRB Perkapita	43

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Perubahan Peringkat PDRB Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2000 dan Tahun 2005	26
Tabel 3.2	Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor Industri Tahun 2000	30
Tabel 3.3	Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor Industri Tahun 2005	30
Tabel 3.4	Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Tahun 2000	33
Tabel 3.5	Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Tahun 2005	34
Tabel 3.6	Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor Pertanian Tahun 2000	36
Tabel 3.7	Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor Pertanian Tahun 2005	37
Tabel 3.8	Perbandingan Laju Pertumbuhan Dengan Peranan Tiga Sektor Utama Terbesar di Sepuluh Kabupaten / Kota Tahun 2001 dan 2000	40
Tabel 3.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Tahun 2001-2005 (%)	41
Tabel 3.10	PDRB Perkapita Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2000	44
Tabel 3.11	PDRB Perkapita Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2005	44
Tabel 3.12	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten / Kota Yang Rata-rata Berada di atas PDRB Perkapita Propinsi Jawa Timur	45
Tabel 3.13	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Yang Rata-rata Berada di bawah PDRB Perkapita Propinsi Jawa Timur	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peringkat PDRB Kabupaten/Kota Berdasarkan Kontribusi Masing-masing Kabupaten/Kota Terhadap Jawa Timur Tahun 2000 (%)	27
Gambar 2 Peringkat PDRB Kabupaten/Kota Berdasarkan Kontribusi Masing-masing Kabupaten/Kota Terhadap Jawa Timur Tahun 2005 (%)	28
Gambar 3 Peranan Sektor Industri Kabupaten / Kota Tahun 2000 (%)	32
Gambar 4 Peranan Sektor Industri Kabupaten / Kota Tahun 2005 (%)	32
Gambar 5 Peranan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Kabupaten / Kota Tahun 2000 (%)	35
Gambar 6 Peranan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Kabupaten / Kota Tahun 2005 (%)	35
Gambar 7 Peranan Sektor Pertanian Kabupaten / Kota Tahun 2000 (%)	37
Gambar 8 Peranan Sektor Pertanian Kabupaten / Kota Tahun 2004 (%)	38
Gambar 9 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Terhadap Propinsi Jawa Timur tahun 2001	42
Gambar 10 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Terhadap Propinsi Jawa Timur tahun 2005	42

DAFTAR LAMPIRAN

PDRB Menurut Lapangan Usaha	Halaman
1. Kabupaten Pacitan	47 - 54
2. Kabupaten Ponorogo	55 - 62
3. Kabupaten Trenggalek	63 - 70
4. Kabupaten Tulungagung	71 - -
5. Kabupaten Blitar	79 - 86
6. Kabupaten Kediri	87 - 94
7. Kabupaten Malang	95 - 102
8. Kabupaten Lumajang	103 - 110
9. Kabupaten Jember	111 - 118
10. Kabupaten Banyuwangi	119 - 126
11. Kabupaten Bondowoso	127 - 134
12. Kabupaten Situbondo	135 - 142
13. Kabupaten Probolinggo	143 - 150
14. Kabupaten Pasuruan	151 - 158
15. Kabupaten Sidoarjo	159 - 166
16. Kabupaten Mojokerto	167 - 174
17. Kabupaten Jombang	175 - 182
18. Kabupaten Nganjuk	183 - 190
19. Kabupaten Madiun	191 - 198
20. Kabupaten Magetan	199 - 206
21. Kabupaten Ngawi	207 - 214
22. Kabupaten Bojonegoro	215 - 222
23. Kabupaten Tuban	223 - 230
24. Kabupaten Lamongan	231 - 238
25. Kabupaten Gresik	239 - 246
26. Kabupaten Bangkalan	247 - 254
27. Kabupaten Sampang	255 - 262
28. Kabupaten Pamekasan	263 - 270
29. Kabupaten Sumenep	271 - 278
30. Kota Kediri	279 - 286
31. Kota Blitar	287 - 294
32. Kota Malang	295 - 302
33. Kota Probolinggo	303 - 310
34. Kota Pasuruan	311 - 318
35. Kota Mojokerto	319 - 326
36. Kota Madiun	327 - 334
37. Kota Surabaya	335 - 342
38. Kota Batu	343 - 350

I. PENDAHULUAN

1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Data PDRB mempunyai peranan penting dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dengan pembangunan yang makin pesat dan meluas ke daerah-daerah, data PDRB Kabupaten/Kota terasa semakin diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan data Kabupaten/Kota itulah, maka Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur (BAPPEPROP) telah melakukan penghitungan PDRB masing-masing kabupaten/kota secara berkala.

Penghitungan PDRB kabupaten/kota ini dilakukan oleh BPS Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan cara alokasi. Untuk menjaga keseragaman konsep, definisi, dan metode yang dipakai dalam penghitungan dan penyusunan PDRB di seluruh Indonesia, BPS Propinsi Jawa Timur melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan BPS Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Sedangkan untuk memperoleh seri data PDRB yang cukup panjang BPS Propinsi Jawa Timur melakukan perbaikan penghitungan setiap tahun sesuai dengan perkembangan dan kelengkapan data yang tersedia di setiap kabupaten/kota.

2. PUBLIKASI

Penerbitan data PDRB kabupaten/kota hasil alokasi ini, berisikan tabel-tabel nilai tambah sektoral, distribusi persentase, indeks berantai, indeks implisit, dan PDRB perkapita masing-masing Kabupaten/Kota se Jawa Timur, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha. Disamping itu disajikan pula tabel-tabel hasil olahannya seperti distribusi masing-masing sektor dalam propinsi maupun antar kabupaten/kota, indeks berantai masing-masing sektor, dan perbandingan PDRB perkapita per kabupaten/kota se Jawa Timur.

3. KONSEP DAN DEFINISI

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah/region (dalam hal ini kabupaten/kota), tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Dengan kata lain PDRB menunjukkan gambaran *Production Originated*.

Sampai saat ini BPS Propinsi Jawa Timur belum dapat menyajikan pendapatan yang benar-benar diterima penduduk masing-masing kabupaten/kota, karena masih sulitnya data yang menggambarkan arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten/kota. Dalam pengertian ini pendapatan dari faktor produksi yang berada di suatu kabupaten tetapi dimiliki oleh penduduk di kabupaten lain, yang seharusnya merupakan bagian dari pendapatan kabupaten tempat tinggal pemilik, tetapi sampai saat ini data seperti ini masih sangat sulit untuk memperoleh gambarannya.

4. METODE PENGHITUNGAN

Ada dua metode yang dapat dipakai untuk menghitung PDRB yaitu :

a. Metode Langsung

Penghitungan didasarkan sepenuhnya pada data daerah yang sama sekali terpisah dengan data propinsi, sehingga hasil penghitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Pemakaian metode ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan :

(1). Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Sedangkan nilai tambah adalah nilai produksi bruto (NPB/output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang dikeluarkan.

(2). Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah *upah* dan *gaji*, *sewa tanah*, *bunga modal* dan *keuntungan*. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini menurut sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Sedangkan PDRB merupakan jumlah dari NTB seluruh sektor (lapangan usaha).

Dari dua pendekatan penghitungan tersebut, secara konsep seyogyanya jumlah komponen nilai tambah (upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan) tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan setelah dikeluarkan biaya antaranya. PDRB yang telah diuraikan di atas disebut sebagai produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

b. Metode Tidak Langsung/Alokasi

Menghitung nilai tambah suatu kelompok kegiatan ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah propinsi kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktifitas kegiatan ekonomi tersebut.

Pemakaian masing-masing metode pendekatan sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada kenyataannya, pemakaian kedua metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain, karena metode langsung akan mendorong peningkatan mutu maupun kualitas data kabupaten/kota, sedang metode tidak langsung akan merupakan koreksi dan pembanding data kabupaten/kota.

5. KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA

Seperti diketahui angka nominal PDRB adalah penjumlahan/agregasi dari seluruh NTB kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota. Dalam penghitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sektor, sesuai dengan pembagian PDRB yang digunakan dalam penghitungan PDRB propinsi, pembagian ini didasarkan pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

6. SURVEI KHUSUS PENDAPATAN REGIONAL

Diantara kedua metode penghitungan PDRB sektoral, sampai saat ini yang sering digunakan adalah pendekatan produksi, sedangkan untuk pendekatan pendapatan hanya digunakan pada sektor-sektor tertentu.

Dalam penghitungan PDRB melalui pendekatan produksi, NTB merupakan hasil pengurangan NPB/output dengan biaya antara. Data mengenai biaya antara, pada umumnya diperoleh dari Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) yang dilaksanakan di setiap kabupaten/kota untuk setiap sektor tertentu secara berkala (biasanya setiap tahun). Dari hasil pengolahan SKPR didapatkan struktur biaya antara, yaitu rasio biaya antara dan nilai tambah terhadap masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor yang disurvei. Informasi lain yang dapat diperoleh adalah rata-rata output per indikator produksi, harga dan indikator-indikator lainnya. Estimasi NTB dapat diperoleh dengan mempergunakan rasio yang dihitung dari struktur biaya seperti tersebut diatas.

Pengambilan sampel dalam SKPR dilakukan dengan cara purposive, karena tujuan dari pelaksanaan SKPR hanya untuk menghasilkan rasio struktur biaya, dan indikator-indikator penting lainnya saja, tidak untuk mengestimasi nilai keseluruhan dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor yang disurvei, karena populasi keseluruhan kegiatan tidak diketahui.

7. PENGHITUNGAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN

Hasil penghitungan PDRB Kabupaten/Kota disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000.

a. Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai NTB atau nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi didalam suatu daerah dalam suatu periode tertentu biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga pada tahun yang bersangkutan.

NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan NPB/Output dengan biaya antara masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku, adalah menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor. Mengingat sifat dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor, maka penilaian NPB/output dilakukan sebagai berikut:

(1). Untuk sektor-sektor primer yang produksinya bisa diperoleh secara langsung dari alam seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, pertama kali dicari kuantum produksi dengan satuan standar yang biasa digunakan. Setelah itu ditentukan kualitas dari jenis barang yang dihasilkan. Satuan dan kualitas yang digunakan tidak selalu sama antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Selain itu diperlukan juga data harga per unit/satuan dari barang yang dihasilkan. Harga yang dipergunakan adalah harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen atau harga yang terjadi pada transaksi pertama antara produsen dan konsumen. NPB/Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara kuantum produksi dengan harga masing-masing komoditi pada tahun yang bersangkutan. Selain menghitung nilai produksi utama, dihitung pula nilai produksi sampingan dan ikutan yang dihasilkan dengan anggapan mempunyai nilai ekonomi.

(2). Untuk sektor-sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri, listrik, gas dan air bersih, dan sektor konstruksi, penghitungannya sama dengan sektor primer. Data yang diperlukan adalah kuantum produksi yang dihasilkan serta harga produsen masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor yang bersangkutan. NPB/output atas dasar harga yang berlaku merupakan perkalian antara kuantum produksi dengan harga masing-masing komoditi pada tahun yang bersangkutan.

(3). Untuk sektor-sektor yang secara umum produksinya berupa jasa seperti perdagangan, restoran, hotel, pengangkutan dan komunikasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya serta sektor jasa-jasa, untuk penghitungan kuantum produksinya dilakukan dengan mencari indikator produksi yang sesuai dengan masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor. Pemilihan indikator produksi didasarkan pada karakteristik jasa yang dihasilkan serta disesuaikan dengan data penunjang lainnya yang tersedia. Selain itu diperlukan juga indikator harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor yang bersangkutan. NPB/output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga masing-masing komoditi/jasa pada tahun yang bersangkutan.

b. Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan

Penghitungan atas dasar harga konstan, pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. NTB atas dasar harga konstan ini, hanya menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Penggunaan metode penghitungan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

(1). Revaluasi

Cara ini dilakukan dengan menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar (2000). Hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000.

Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang sangat beragam, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio (tetap) biaya antara terhadap output pada tahun dasar atau dengan rasio biaya antara terhadap output pada tahun berjalan.

(2). Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks kuantum produksi. Indeks ini bertindak sebagai ekstrapolator yang dapat merupakan indeks dari masing-masing kuantum produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator kuantum produksi lainnya seperti: tenaga kerja; jumlah perusahaan yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang sedang dihitung.

Ekstrapolator dapat juga dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

(3). Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dapat diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun dengan indeks harganya. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar dan sebagainya, tergantung indeks mana yang dianggap lebih cocok. Indeks harga tersebut dapat pula dipakai sebagai inflator, yang berarti nilai tambah atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

II. URAIAN SEKTORAL

Uraian sektoral yang disajikan dalam Bab II ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan subsektor, cara-cara penghitungan nilai tambah, baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, serta sumber datanya.

2.1 Sektor Pertanian

2.1.1 Tanaman Bahan Makanan

Subsektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele, sayur-sayuran, buah-buahan, kentang, kacang hijau, tanaman pangan lainnya, dan hasil-hasil produk ikutannya. Termasuk dalam cakupan ini adalah hasil-hasil dari pengolahan yang dilakukan secara sederhana seperti beras tumbuk dan gaplek. Data produksi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur, sedangkan data harga seluruhnya bersumber dari data harga yang dikumpulkan oleh BPS Propinsi Jawa Timur.

Nilai tambah bruto atas dasar harga yang berlaku diperoleh melalui pendekatan produksi, yaitu dengan mengalikan terlebih dahulu setiap jenis kuantum produksi dengan masing-masing harganya, kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya antara atas dasar harga yang berlaku. Biaya antara tersebut diperoleh dengan menggunakan rasio biaya antara terhadap output yang diperoleh dari hasil survei khusus. Sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum produksi masing-masing tahun dengan harga pada tahun 2000, kemudian dikurangi biaya antara atas dasar harga konstan 2000.

2.1.2 Tanaman Perkebunan

a. Tanaman Perkebunan Rakyat

Komoditi yang dicakup adalah hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti jambu mete, kelapa, kopi, kapok, kapas, tebu, tembakau, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya. Data produksi diperoleh dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, sedangkan data harga diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi. Rasio biaya antara serta rasio margin perdagangan dan biaya transport yang digunakan diperoleh dari Tabel Input-Output Indonesia 1995. Sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi, sama seperti yang dilakukan pada tanaman bahan makanan.

b. Tanaman Perkebunan Besar

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor ini adalah kegiatan yang memproduksi komoditi perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seperti karet, teh, kopi, coklat, minyak sawit, inti sawit, tebu, rami, serat manila, dan tanaman lainnya. Cara penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 sama seperti yang dilakukan pada tanaman perkebunan rakyat.

2.1.3 Peternakan dan Hasil-hasilnya

Subsektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak, seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba, susu segar, dan telur. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong, ditambah perubahan stock populasi ternak dan ekspor ternak netto. Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, populasi ternak, produksi susu, dan telur serta banyaknya ternak yang keluar masuk wilayah Jawa Timur diperoleh dari Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur,

sedangkan data harga ternak diperoleh dari laporan harga produsen BPS Propinsi Jawa Timur.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara mengalikan nilai produksi dengan rasio nilai tambah berdasarkan hasil survei khusus pendapatan regional.

2.1.4 Kehutanan

Subsektor kehutanan mencakup kegiatan yang dilakukan di areal hutan oleh perorangan dan badan usaha, yang mencakup usaha penanaman, pemeliharaan dan penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lainnya dan perburuan. Kegiatan ini meliputi, penebangan kayu yang menghasilkan kayu gelondongan, kayu bakar, arang, dan bambu; sedangkan hasil kegiatan pengambilan hasil hutan lainnya berupa rotan, damar, kulit kayu, kopal, nipah, nibung, akar-akaran, dan sebagainya masih termasuk dalam sektor ini. Data produksi kayu dan hasil hutan lainnya diperoleh dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.

Sebagaimana dengan subsektor lainnya, dalam sektor pertanian, output subsektor kehutanan dihitung dengan cara mengalikan kuantum produksi dengan harga masing-masing tahun yang menghasilkan output atas dasar harga berlaku, dan penggunaan harga pada tahun dasar menghasilkan output atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto dihitung dengan menggunakan rasionya terhadap output. Rasio tersebut diperoleh dari hasil Sensus Ekonomi 1996.

2.1.5 Perikanan

Yang dicakup dalam kegiatan perikanan adalah seluruh kegiatan penangkapan dan pengambilan serta budidaya perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam, sawah (mina padi) dan keramba. Data mengenai produksi dan nilai produksi diperoleh dari Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur. Penghitungan nilai tambah bruto dilakukan

dengan mengalikan rasio nilai tambah bruto terhadap output. Rasio nilai tambah diperoleh dari survei khusus pendapatan regional.

2.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor ini mencakup kegiatan pertambangan, penggalian, pengeboran, penyaringan, dan pengambilan pemanfaatan segala macam benda non biologis, seperti barang tambang, mineral, dan barang galian, serta pembuatan garam kasar. Produksi yang dihasilkan meliputi minyak mentah dan gas bumi, yodium, biji mangan, belerang, serta segala jenis hasil penggalian dan garam kasar. Data produksi minyak mentah dan barang-barang tambang lainnya diperoleh dari BPS sedangkan untuk data penggalian lainnya diperoleh dari Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Timur dan survei khusus. Nilai output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara produksi dengan harganya masing-masing, sedangkan output atas dasar harga konstan dengan cara revaluasi

2.3 Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini mencakup kegiatan untuk mengubah atau mengolah suatu barang organik dan anorganik menjadi barang baru yang mempunyai nilai lebih tinggi, sedang pengolahannya dapat dilakukan dengan tangan atau mesin. Kegiatan industri amat beragam dilihat dari komoditi yang dihasilkan dan cara pengolahannya, sampai pengelompokan kegiatan industri. Pengelompokan yang telah dilakukan BPS didasarkan pada proses pembuatan dan banyaknya tenaga kerja yang terlibat. Disini dibedakan menjadi empat kelompok yaitu :

- Kelompok Industri Besar dengan tenaga kerja lebih atau sama dengan 100 orang.
- Kelompok Industri Sedang dengan tenaga kerja 20 sampai 99 orang
- Kelompok Industri Kecil dengan tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang
- Kelompok Industri kerajinan rumah tangga sampai 4 orang

Pengelompokan lain dari kegiatan industri dibuat berdasarkan jenis komoditi utama yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan, yang secara garis besarnya kegiatan industri dikelompokan menjadi 9 subsektor, yaitu :

- Industri makanan, minuman, dan tembakau
- Industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki
- Industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya
- Industri kertas dan barang cetakan
- Industri pupuk, barang kimia, dan barang dari karet
- Industri semen dan barang galian bukan logam
- Industri logam dasar besi dan baja
- Industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya
- Industri barang lainnya.

Data output dan nilai tambah industri besar sedang atas dasar harga berlaku, diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Timur, sedangkan output dan nilai tambah industri kecil dan kerajinan rumah tangga diperoleh dari Perindustrian Propinsi Jawa Timur dan survei khusus. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung melalui cara deflasi dengan Indeks Harga Perdagangan Besar masing-masing kelompok industri.

2.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Data produksi yang disajikan adalah data dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), PN Gas, dan Perusahaan Daerah Air Minum. Output masing-masing subsektor mencakup semua produksi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan definisinya.

2.4.1 Listrik

Subsektor ini mencakup semua kegiatan kelistrikan, baik yang diusahakan oleh PLN Distribusi, PLN pembangkit wilayah Jawa Timur, dan PLN Pengatur Beban. Data

produksi, harga, dan biaya antara subsektor ini diperoleh dari PLN Distribusi dan Pembangkit Jawa Timur. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian produksi dengan harga yang berlaku pada masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan 2000, diperoleh dengan cara revaluasi.

2.4.2 Gas

Komoditi yang dicakup dalam subsektor ini adalah gas produksi Perusahaan Negara Gas Surabaya. Data produksi, harga, dan biaya-biaya yang digunakan diperoleh dari perusahaan tersebut. Perkiraan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan persentase nilai tambah terhadap output masing-masing tahun.

2.4.3 Air Bersih

Subsektor ini mencakup air minum yang diusahakan oleh Perusahaan Air Minum. Data produksi, harga, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air minum diperoleh dari laporan Perusahaan Daerah Air Minum se Jawa Timur yang dikumpulkan oleh BPS Propinsi Jawa Timur. Perhitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara yang sama seperti pada subsektor Gas.

2.5 Sektor Bangunan

Sektor bangunan mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dam, irigasi, eksplorasi minyak bumi maupun jaringan listrik, gas, air minum, telepon, dan sebagainya. Nilai tambah bruto dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi. Output diperoleh dari penjumlahan nilai pembangunan prasarana fisik yang dari segi pendanaan dapat dirinci menjadi: nilai pembangunan pemerintah pusat yang dibiayai dari APBN dan nilai pembangunan daerah yang dibiayai APBD serta perbaikannya; dan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh *developer*, Perumnas serta yang dilakukan oleh

swadaya masyarakat murni. Sedangkan persentase nilai tambah bruto diperoleh dari survei khusus. Output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi, deflatornya adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan dan Konstruksi.

2.6 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

2.6.1 Perdagangan Besar dan Eceran

Perhitungan nilai tambah subsektor perdagangan dilakukan dengan pendekatan arus barang (*commodity flow*), yaitu dengan menghitung besarnya nilai komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, serta komoditi impor yang diperdagangkan. Dari nilai komoditi yang diperdagangkan, diturunkan nilai margin perdagangan yang merupakan output perdagangan yang selanjutnya dipakai untuk menghitung nilai tambahnya. Rasio besarnya barang-barang yang diperdagangkan, margin perdagangan dan persentase nilai tambah didasarkan pada data hasil penyusunan tabel Input-output Indonesia 1985 serta survei khusus. Nilai Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000, dihitung dengan mengalikan rasio-rasio di atas dengan output atas dasar harga konstan 2000 dari sektor-sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta impor.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian antara rasio nilai tambah dengan outputnya.

2.6.2 Hotel

Kegiatan subsektor ini mencakup semua hotel, baik berbintang maupun tidak berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya. Output dihitung dengan cara mengalikan jumlah malam tamu dan tarifnya. Dalam hal ini malam tamu dianggap sebagai kuantum dari output. Untuk keperluan ini, data diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Timur, sedangkan persentase nilai tambah diperoleh dari hasil survei khusus yang dilakukan oleh BPS Propinsi Jawa Timur.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian antara persentase nilai tambah dengan outputnya.

2.6.3 Restoran

Karena data restoran tidak lengkap, maka output dari subsektor ini diperoleh dari nilai penerimaan Pembangunan I dari Dispenda Propinsi Jawa Timur ditambah dengan output restoran yang tidak berbadan hukum dari Sensus Ekonomi 1996 dan dari survei khusus. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi, menggunakan indeks harga konsumen makanan jadi dan minuman sebagai deflator.

2.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang dan penumpang, baik melalui darat, laut, sungai/danau, dan udara. Sektor ini mencakup pula jasa penunjang angkutan dan komunikasi.

2.7.1 Angkutan Kereta Api

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Perusahaan Umum Kereta Api. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang penumpang dan ton-km barang yang diangkut.

2.7.2 Angkutan Jalan Raya

Subsektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor ataupun tidak bermotor, seperti bis, truk, bemo, taksi, becak, dokar, dan sebagainya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dengan menggunakan pendekatan produksi yang didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang wajib uji yang

diperoleh dari laporan tahunan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) dan hasil survei khusus pendapatan regional angkutan yang dilakukan setiap tahun, sedangkan untuk data kendaraan tidak bermotor diperoleh dari Dinas Pendapatan Pajak dan berbagai survei. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi.

2.7.3 Angkutan Laut/Air

Subsektor angkutan laut/air meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran milik nasional, baik yang melakukan trayek dalam negeri maupun internasional. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan jumlah penumpang dan barang yang dimuat dari Perum Pelabuhan III Propinsi Jawa Timur, dengan rata-rata output per penumpang dan barang. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks gabungan tertimbang jumlah penumpang dan barang yang dimuat.

2.7.4 Angkutan Udara

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan penumpang, barang, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan milik nasional, baik penerbangan dalam negeri maupun internasional. Nilai tambah atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara alokasi dari angka nasional dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang yang dimuat, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dengan cara deflasi dengan menggunakan indeks harga tiket dan ongkos kargo.

2.7.5 Jasa Penunjang Angkutan

Meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal dan parkir,

keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar/muat, penyimpanan dan pergudangan serta jasa penunjang angkutan lainnya.

a. Terminal dan Perparkiran

Mencakup kegiatan pemberian pelayanan dan pengaturan lalu lintas kendaraan/armada yang membongkar atau mengisi muatan, baik barang maupun penumpang, seperti kegiatan terminal dan parkir, pelabuhan laut, pelabuhan udara. Pelayanan yang disediakan di pelabuhan laut meliputi fasilitas berlabuh, tambat, pandu, distribusi air tawar serta kegiatan pencatatan muatan barang dan penumpang. Data output pelabuhan udara, laut diperoleh dari Laporan Tahunan Perum Angkasa Pura dan Perum Pelabuhan III Wilayah Jawa Timur, sedangkan data output perparkiran diperoleh dari Dispenda Propinsi Jawa Timur dan Survei Khusus. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi memakai indeks harga konsumen komponen biaya transport.

b. Bongkar/Muat

Kegiatan bongkar/muat mencakup pemberian pelayanan bongkar/muat angkutan barang melalui laut dan darat. Indikator produksi untuk bongkar muat melalui laut adalah jumlah barang yang dibongkar dan dimuat. Data jumlah perusahaan diperoleh dari Dinas Perhubungan, sedangkan data rata-rata outputnya dari survei khusus. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi memakai indeks harga konsumen komponen biaya transport.

c. Ekspedisi dan Keagenan

Kegiatan keagenan mencakup pelayanan keagenan barang dan penumpang yang diberikan kepada usaha angkutan, baik angkutan darat, udara, sungai maupun laut. Data jumlah perusahaan diperoleh dari Dinas Perhubungan, sedangkan data rata-rata outputnya dari survei khusus. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000

dilakukan dengan cara deflasi memakai indeks harga konsumen komponen biaya transport.

d. Pergudangan

Kegiatan pergudangan mencakup pemberian jasa penyimpanan barang, dalam suatu bangunan ataupun di lapangan terbuka dalam wilayah suatu pelabuhan laut. Data jumlah perusahaan diperoleh dari Dinas Perhubungan, sedangkan data rata-rata outputnya dari survei khusus. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi memakai indeks harga konsumen komponen biaya transport.

2.7.6 Komunikasi

Kegiatan yang dicakup adalah jasa pos giro dan telekomunikasi.

a. Pos dan Giro

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan, dan sebagainya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan kepada data produksi dan struktur biaya yang diperoleh dari laporan keuangan Perusahaan Umum Pos dan Giro. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara ekstrapolasi, menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim dan jumlah uang yang digirokan.

b. Telekomunikasi

Kegiatan ini mencakup pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan telepon, telegraf, dan teleks. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang bersumber dari laporan keuangan Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Jawa Timur.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit lokal/interlokal dan banyaknya pemegang telepon yang bersumber dari Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Jawa Timur.

c. Jasa Penunjang Komunikasi

Kegiatan subsektor ini mencakup pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang kegiatan komunikasi, seperti wartel, warpostel, radio pager, telepon seluler (ponsel). Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari survei khusus, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit lokal/interlokal dan banyaknya pelanggan telepon yang bersumber dari Dinas Perhubungan dan survei khusus.

2.8 Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor ini meliputi kegiatan perbankan, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan, dan jasa perusahaan.

2.8.1 Bank

Angka nilai tambah bruto subsektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia. Dalam penghitungan PDRB tidak menghitung nilai tambah bruto yang ditimbulkan dari kegiatan Bank Indonesia yang mencakup pembayaran bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan pinjaman dari luar negeri, karena hal itu merupakan kebijaksanaan moneter yang bukan merupakan kegiatan komersial perbankan.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan indeks kredit yang diberikan bank pada tiap-tiap tahun, sedangkan indeks kredit yang digunakan adalah indeks kredit riil yang sudah dideflasikan dengan

kenaikan suku bunga perbankan. Jumlah kredit yang dilepas oleh bank diperoleh dari Bank Indonesia Cabang Jawa Timur.

2.8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kegiatan lembaga keuangan bukan bank meliputi kegiatan asuransi, koperasi, yayasan dana pensiun, dan pegadaian.

Perhitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi. Output diperoleh dari perkalian indikator produksi dengan indikator harga, sedangkan nilai tambah bruto diperoleh dengan cara mengurangkan nilai biaya antara dari nilai output. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi, dan pada kegiatan yayasan dana pensiun dengan cara deflasi. Data indikator produksi koperasi diperoleh dari Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur, sedangkan data pegadaian, yayasan dana pensiun, dan asuransi diperoleh dari Perum Pegadaian Jawa Timur dan survei khusus.

2.8.3 Jasa Penunjang Keuangan

Kegiatan jasa penunjang keuangan meliputi berbagai kegiatan ekonomi antara lain: Bursa Efek Surabaya; Perdagangan Valuta Asing; perusahaan anjak piutang; pialang saham, dan modal ventura.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada data laporan rugi-laba yang diperoleh dari Bursa Efek Surabaya dan survei khusus dari masing-masing perusahaan tersebut di atas. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara deflasi dan sebagai deflator adalah Indeks Harga Konsumen (umum).

2.8.4 Sewa Bangunan

Sektor ini mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan rumah bangunan sebagai tempat tinggal rumahtangga dan bukan sebagai tempat tinggal, tanpa

memperhatikan apakah bangunan itu milik sendiri atau disewa. Perkiraan nilai tambah bruto tahun 1993 didasarkan kepada data jumlah bangunan tempat tinggal hasil Sensus Penduduk dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, serta berdasarkan pengeluaran konsumsi rumahtangga, khususnya pengeluaran untuk sewa rumah. Perkiraan untuk bangunan bukan tempat tinggal didasarkan kepada hasil survei-survei khusus.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan antara jumlah bangunan dengan rata-rata tarif sewa untuk bangunan rural dan urban, sedangkan untuk penghitungan atas dasar harga konstan 2000 diperkirakan dengan cara ekstrapolasi menggunakan jumlah bangunan tempat tinggal dan bukan sebagai tempat tinggal sebagai ekstrapolatornya, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperkirakan dengan cara menginflasi nilai bangunan dan tempat tinggal.

2.8.5 Jasa Perusahaan

Subsektor ini meliputi jasa pengacara, jasa akuntan, biro arsitektur, jasa pengolahan data, jasa periklanan, dan sebagainya.

Perkiraan output dan nilai tambah bruto didasarkan kepada data jumlah tenaga kerja yang bersumber dari hasil Sensus Ekonomi 1996 dan hasil survei khusus, dengan rata-rata output per tenaga kerja dan persentase nilai tambah bruto yang juga diperoleh dari survei khusus. Sedangkan Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dengan cara revaluasi.

2.9 Sektor Jasa-jasa

2.9.1 Jasa Pemerintahan Umum

Nilai tambah bruto subsektor jasa pemerintahan umum terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencakup upah dan gaji di belanja rutin dan sebagian dari belanja pembangunan. Perkiraan penyusutan adalah sebesar 5 persen dari total upah dan gaji yang telah dihitung. Data yang dipakai adalah realisasi pengeluaran pemerintah pusat yang diperoleh dari BPS, sedangkan data

untuk pengeluaran pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten diperoleh dari laporan tahunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Untuk pemerintah desa diperoleh dengan cara sampel masing-masing sebesar 60 persen dari Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks jumlah pegawai negeri pusat dan daerah.

2.9.2 Jasa Sosial dan Kemasyarakatan

Subsektor ini mencakup jasa pendidikan formal dan non formal, jasa kesehatan, serta jasa kemasyarakatan lainnya seperti jasa penelitian, jasa palang merah, panti asuhan, panti wredha, yayasan pemeliharaan anak cacat, dan rumah ibadat. Untuk kegiatan jasa pendidikan adalah yang hanya dikelola oleh swasta saja, karena yang dikelola oleh pemerintah nilai tambahnya sudah tergabung dengan subsektor pemerintah, sedangkan untuk jasa sosial lainnya yang dicakup adalah seluruh kegiatan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

a. Jasa Pendidikan

Data yang digunakan untuk memperkirakan nilai tambah bruto subsektor jasa pendidikan adalah jumlah murid sekolah swasta menurut jenjang pendidikan, yang diperoleh dari Kantor Wilayah Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan untuk pendidikan formal di luar Kanwil Pendidikan Propinsi Jawa Timur datanya diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Timur. Data output per murid dan persentase nilai tambah diperoleh dari kegiatan survei khusus. Sedangkan Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi.

b. Jasa Kesehatan

Subsektor ini mencakup jasa rumah sakit, dokter praktek, bidan praktek, dukun praktek, dan jasa kesehatan lainnya yang dikelola oleh swasta. Perkiraan output untuk

masing-masing kegiatan didasarkan kepada hasil perkalian antara rata-rata output per indikator produksi dan kuantum produksinya seperti: rata-rata tempat tidur rumah sakit dan jumlah tempat tidur; rata-rata output per dokter dan jumlah dokter praktek; rata-rata output per bidan dan jumlah bidan praktek; dan rata-rata output per dukun bayi dan jumlah dukun bayi praktek.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan kepada persentase terhadap output. Data yang digunakan bersumber dari Dinas Kesehatan dan Kanwil Kesehatan Propinsi Jawa Timur serta dari survei khusus pendapatan regional. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi masing-masing kegiatan.

c. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan Lainnya

Dari hasil survei khusus mengenai panti asuhan dan panti wredha, diperoleh rata-rata output per anak yang diasuh dan rata-rata output per orang tua yang dilayani sekaligus struktur inputnya. Kemudian dengan mengalikan jumlah anak yang diasuh dan orang tua yang dilayani dengan rata-rata outputnya, diperoleh perkiraan output kegiatan jasa sosial dan kemasyarakatan lainnya. Data jumlah anak dan orang tua yang diasuh/dilayani diperoleh dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi.

Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) memberikan data mengenai pengeluaran perkapita untuk biaya kursus. Dengan mengalikan jumlah penduduk pertengahan tahun dengan indikator tersebut akan diperoleh nilai output yang selanjutnya dengan rasio nilai tambah bruto dapat diperoleh nilai tambah bruto. Untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan adalah dengan cara deflasi, dan sebagai deflatornya adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok aneka barang dan jasa. Dari survei khusus diperoleh data rata-rata input rumah ibadah, dengan mengalikan jumlah tempat ibadah yang diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Timur maka diperoleh nilai tambah. Sedangkan untuk penghitungan atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara revaluasi.

2.9.3 Jasa Hiburan dan Kebudayaan

Subsektor ini mencakup televisi swasta, jasa bioskop, panggung kesenian, studio radio swasta, taman hiburan, dan klub malam, bilyar serta produksi dan distribusi film.

Data output dan nilai tambah bioskop, panggung hiburan, bilyard, dan tempat-tempat hiburan lainnya diperoleh dari Dispenda, sedangkan data output televisi, radio swasta, dan hiburan lainnya diperoleh dari survei khusus. Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 adalah dengan cara deflasi menggunakan IHK aneka barang dan jasa.

2.9.4 Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Subsektor ini mencakup jasa perbengkelan, tukang binatu, salon, tukang jahit, reparasi, tukang jasa perorangan, dan pembantu rumahtangga. Nilai output diperkirakan dengan cara mengalikan jumlah tenaga kerja yang didasarkan kepada hasil Sensus Ekonomi 1996, Sakernas, dan survei khusus dengan rata-rata output per tenaga kerja yang juga diperoleh dari survei khusus. Sedangkan untuk memperoleh nilai tambah bruto adalah dengan cara mengalikan persentase nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi

III. RINGKASAN HASIL PENGHITUNGAN PDRB KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR

Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum perekonomian kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2000-2005. Kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten/kota secara umum dapat dilihat melalui beberapa indikator ekonomi makro yaitu antara lain besaran nilai tambah yang dihasilkan, struktur perekonomian, laju pertumbuhan, dan PDRB perkapita.

Perekonomian di setiap kabupaten/kota terbentuk dari berbagai macam aktivitas/kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. Untuk menganalisa ekonomi suatu daerah, kegiatan ekonomi di kelompokkan ke dalam 9 sektor/lapangan usaha. Pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk melihat gambaran mengenai keadaan sektor-sektor ekonomi yang menentukan dan berpengaruh di setiap kabupaten/kota.

3.1 PDRB Antar Kabupaten/Kota

PDRB merupakan keseluruhan nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Oleh karena itu besaran PDRB dalam periode tertentu sering digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja pelaku ekonomi di suatu wilayah, terutama yang berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang ada. Untuk membandingkan kinerja ekonomi ini antar wilayah dapat dilakukan dengan jalan membandingkan PDRB antar kabupaten/kota.

Perbandingan PDRB antar kabupaten/kota ini meliputi perbandingan sumbangan masing-masing kabupaten/kota terhadap total PDRB propinsi, pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota, dan PDRB perkapita antar kabupaten/kota.

Propinsi Jawa Timur mempunyai 38 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Dari 38 kabupaten/kota tersebut, masing-masing daerah mempunyai karakteristik alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda-beda. Hal itu telah menyebabkan produktifitas perekonomian antara wilayah yang satu berbeda dengan

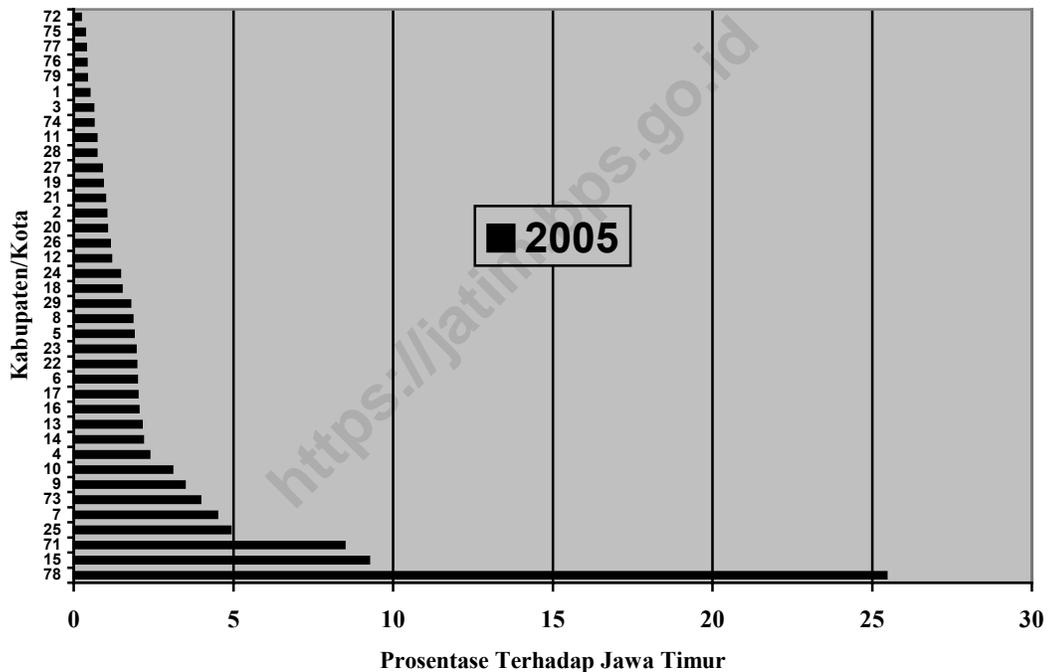
lainnya. Dari tabel 3.1 dapat dilihat peringkat PDRB untuk masing-masing kabupaten/kota pada tahun 2000 dan 2005.

Tabel 3.1
Perubahan Peringkat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2000 dan 2005

Peringkat	Kabupaten/Kota	Tahun 2000		Kabupaten/Kota	Tahun 2005	
		PDRB (Juta Rupiah)	Kontribusi		PDRB (Juta Rupiah)	Kontribusi
1	78 Kota Surabaya	49.156.439,83	24,24	78 Kota Surabaya	102.604.764,27	25,44
2	15 Kab. Sidoarjo	17.879.657,98	8,82	15 Kab. Sidoarjo	37.257.615,68	9,24
3	71 Kota Kediri	17.421.895,14	8,59	71 Kota Kediri	34.166.182,26	8,47
4	25 Kab. Gresik	9.483.087,92	4,68	25 Kab. Gresik	19.801.937,75	4,91
5	7 Kab. Malang	9.271.992,80	4,57	7 Kab. Malang	18.114.361,45	4,49
6	73 Kota Malang	8.573.946,49	4,23	73 Kota Malang	15.990.849,25	3,96
7	9 Kab. Jember	7.061.522,46	3,48	9 Kab. Jember	13.989.047,23	3,47
8	10 Kab. Banyuwangi	6.812.010,05	3,36	10 Kab. Banyuwangi	12.425.909,22	3,08
9	4 Kab. Tulungagung	4.819.432,51	2,38	4 Kab. Tulungagung	9.537.060,56	2,36
10	6 Kab. Kediri	4.608.333,94	2,27	14 Kab. Pasuruan	8.710.298,21	2,16
11	13 Kab. Probolinggo	4.390.073,14	2,16	13 Kab. Probolinggo	8.533.163,46	2,12
12	14 Kab. Pasuruan	4.217.129,93	2,08	16 Kab. Mojokerto	8.165.485,76	2,02
13	23 Kab. Tuban	4.177.466,87	2,06	17 Kab. Jombang	8.009.919,35	1,99
14	29 Kab. Sumenep	3.991.493,36	1,97	6 Kab. Kediri	7.949.889,75	1,97
15	17 Kab. Jombang	3.966.798,96	1,96	22 Kab. Bojonegoro	7.861.498,63	1,95
16	16 Kab. Mojokerto	3.935.264,24	1,94	23 Kab. Tuban	7.796.886,90	1,93
17	22 Kab. Bojonegoro	3.880.115,94	1,91	5 Kab. Blitar	7.562.094,96	1,87
18	5 Kab. Blitar	3.828.811,99	1,89	8 Kab. Lumajang	7.395.124,82	1,83
19	8 Kab. Lumajang	3.782.154,76	1,86	29 Kab. Sumenep	7.083.673,41	1,76
20	24 Kab. Lamongan	3.303.037,67	1,63	18 Kab. Nganjuk	6.065.945,39	1,50
21	18 Kab. Nganjuk	3.161.404,48	1,56	24 Kab. Lamongan	5.844.586,91	1,45
22	12 Kab. Situbondo	2.358.960,60	1,16	12 Kab. Situbondo	4.710.642,43	1,17
23	26 Kab. Bangkalan	2.295.923,12	1,13	26 Kab. Bangkalan	4.542.674,33	1,13
24	2 Kab. Ponorogo	2.210.775,50	1,09	20 Kab. Magetan	4.213.882,01	1,04
25	20 Kab. Magetan	2.187.172,48	1,08	2 Kab. Ponorogo	4.129.898,94	1,02
26	21 Kab. Ngawi	2.107.613,74	1,04	21 Kab. Ngawi	3.956.449,50	0,98
27	27 Kab. Sampang	1.884.914,72	0,93	19 Kab. Madiun	3.658.687,66	0,91
28	19 Kab. Madiun	1.868.283,66	0,92	27 Kab. Sampang	3.532.592,27	0,88
29	11 Kab. Bondowoso	1.521.342,23	0,75	28 Kab. Pamekasan	2.878.852,36	0,71
30	3 Kab. Trenggalek	1.511.499,53	0,75	11 Kab. Bondowoso	2.849.889,23	0,71
31	28 Kab. Pamekasan	1.434.179,67	0,71	74 Kota Probolinggo	2.507.431,87	0,62
32	74 Kota Probolinggo	1.234.793,67	0,61	3 Kab. Trenggalek	2.448.224,78	0,61
33	1 Kab. Pacitan	1.080.775,34	0,53	1 Kab. Pacitan	1.994.580,30	0,49
34	79 Kota Batu	792.472,05	0,39	79 Kota Batu	1.662.341,31	0,41
35	76 Kota Mojokerto	751.497,68	0,37	76 Kota Mojokerto	1.596.457,39	0,40
36	77 Kota Madiun	713.187,68	0,35	77 Kota Madiun	1.526.079,25	0,38
37	75 Kota Pasuruan	685.451,51	0,34	75 Kota Pasuruan	1.427.343,07	0,35
38	72 Kota Blitar	469.149,37	0,23	72 Kota Blitar	890.028,85	0,22
Propinsi Jawa Timur		202.830.063,02	100,00	Propinsi Jawa Timur	403.392.350,76	100,00

Kabupaten Pacitan, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Blitar. Sedangkan beberapa daerah yang menanjak peringkatnya adalah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pamekasan, dan Kota Probolinggo. Berikut disajikan gambar peringkat PDRB kabupaten/kota berdasarkan kontribusi masing-masing tahun 2000 dan tahun 2005.

Gambar 2
Peringkat PDRB Kabupaten/Kota Berdasarkan Kontribusi Masing-Masing Kabupaten/Kota Terhadap Jawa Timur Tahun 2005 (%)



3.2 Struktur / Komposisi Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari masing-masing sektor. Sebagai gambaran berikut disajikan struktur perekonomian di

kabupaten/kota dengan tahun dasar 2000 untuk tiga sektor utama di wilayah Jawa Timur mengalami pergeseran posisi, yaitu industri, perdagangan, hotel, dan restoran, dan pertanian.

Dengan perhitungan PDRB dengan tahun dasar 2000, dapat dilihat bahwa kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur tidak lagi menggantungkan diri yang utama pada sektor pertanian, tetapi telah bergeser pada sektor industri dan perdagangan. Ini menunjukkan bahwa Jawa Timur mulai berkembang menjadi daerah industri dan perdagangan.

Sektor terbesar pertama dalam menyumbang besaran PDRB Jawa Timur adalah sektor industri. Pada tahun 2000 sektor industri menyumbang sebesar 29,79 persen dan kemudian pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar 29,99 persen. Sektor yang kegiatannya mengolah lebih lanjut hasil pertanian dan pertambangan menjadi produk yang lebih bermanfaat ini mempunyai peranan yang cukup strategis dalam perekonomian Jawa Timur. Dalam enam tahun terakhir ini peran sektor industri secara perlahan mengalami kenaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi sektor industri sudah bangkit dari keterpurukan yang terjadi sejak krisis pada tahun 1997. Dengan kondisi perekonomian dan keamanan saat ini yang mulai stabil, diharapkan sektor industri dapat terus mengalami peningkatan dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Tabel 3.2 terlihat bahwa pada tahun 2000 ada 19 kabupaten/kota yang mempunyai peran di sektor industri dibawah 10 persen. Hal ini cukup beralasan karena daerah-daerah ini cukup potensial di sektor pertanian. Selanjutnya pada tahun 2005 (Tabel 3.3), daerah yang sektor industrinya mempunyai peranan dibawah 10 persen berkurang menjadi 16 kabupaten/kota. Kota Batu adalah satu-satunya kota yang mempunyai peranan di bawah 10 persen di Sektor Industri.

Tabel 3.2
Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor
Industri Tahun 2000

Peranan (Persen)	Kabupaten/Kota	Jumlah
≤ 9,99	Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Tulungagung, Kab. Sumenep, Kab. Madiun, Kab. Pacitan, Kab. Bangkalan, Kab. Lamongan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Jember, Kab. Trenggalek, Kab. Nganjuk, Kota Batu, Kab. Jombang	19
10,00 - 19,99	Kota Blitar, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Kediri, Kota Pasuruan, Kab. Malang, Kab. Blitar, Kota Mojokerto, Kab. Tuban, Kab. Lumajang,	10
20,00 - 29,99	Kota Madiun, Kota Probolinggo,	2
30,00 - 39,99	Kab. Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Malang, Kab. Mojokerto,	4
≥ 40,00	Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota Kediri	3
Jumlah		38

Tabel 3.3
Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor
Industri Tahun 2005

Peranan (Persen)	Kabupaten/Kota	Jumlah
≤ 9,99	Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Blitar, Kab. Sumenep, Kab. Madiun, Kab. Pacitan, Kab. Bangkalan, Kab. Lamongan, Kab. Banyuwangi, Kab. Bojonegoro, Kab. Ngawi, Kab. Jember, Kota Batu, Kab. Magetan, Kab. Nganjuk, Kab. Bondowoso	16
10,00 - 19,99	Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kab. Situbondo, Kota Blitar, Kab. Jombang, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kab. Tulungagung, Kab. Lumajang, Kab. Kediri, Kab. Malang,	13
20,00 - 29,99	Kab. Tuban, Kota Madiun	2
30,00 - 39,99	Kab. Pasuruan, Kota Surabaya, Kab. Mojokerto, Kota Malang,	4
≥ 40,00	Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota Kediri	3
Jumlah		38

Di Kota Kediri peran Sektor Industri Pengolahan dalam struktur PDRB adalah terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya. Hal ini disebabkan oleh sumbangan industri rokok yang terdapat di kota tersebut yaitu sebesar 77,16 % pada tahun 2000 dan pada tahun 2005 turun menjadi sebesar 72,07 %. Selain Kota Kediri, yang mempunyai peranan cukup besar yaitu di atas 40,00 %, adalah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Gresik pada tahun 2000 sektor industrinya mempunyai peranan sebesar 47,45%. Kabupaten Gresik sebagai daerah yang memiliki industri pupuk dan semen sebagai andalan ini, pada tahun 2005 sektor industrinya mengalami peningkatan sedikit menjadi 47,65 %. Di Kabupaten Sidoarjo peran sektor Industri mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi sebesar 58,37 % dari sebesar 55,24 % pada tahun 2000.

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa pada tahun 2005 wilayah yang mempunyai peranan Sektor Industri untuk kelompok kedua dengan peranan antara 10 sampai 19,99 persen meliputi 13 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kota Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Malang.

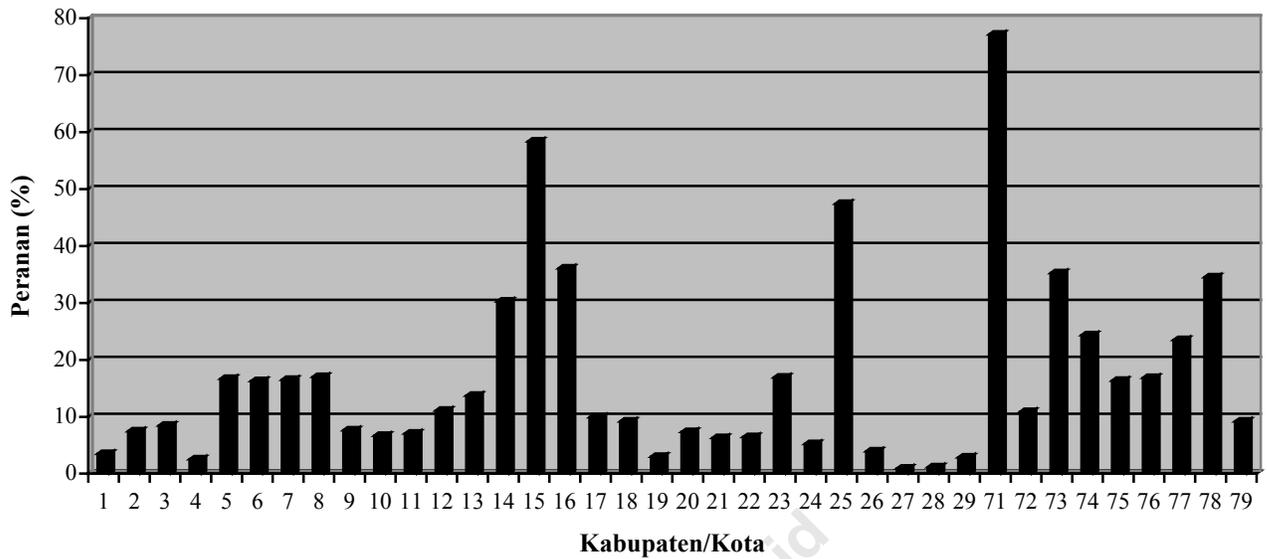
Kelompok ke tiga pada tahun 2005 dengan peran Sektor Industri antara 20 sampai 29,99 persen terdiri dari Kabupaten Tuban dan Kota Madiun. Daerah-daerah ini selain potensial pada sektor pertanian juga merupakan wilayah perdagangan dan industri.

Kelompok ke empat dengan peran Sektor Industri sebesar 30 sampai 39,99 persen meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang.

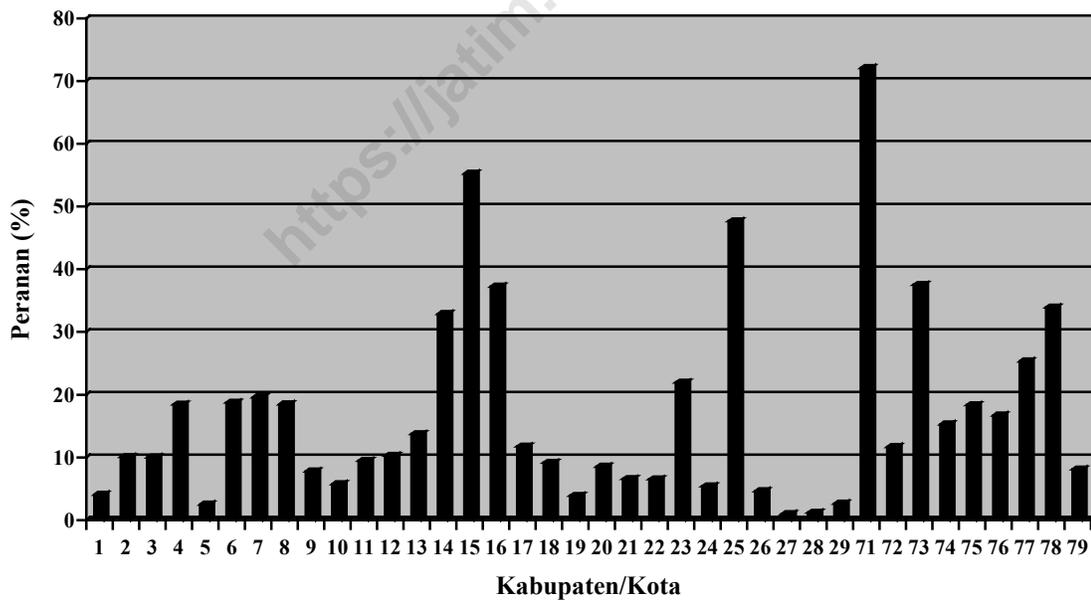
Pada tahun 2005 Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Jombang mengalami peningkatan, sehingga terjadi pergeran peran dari kelompok satu menjadi kelompok dua. Demikian juga dengan Kabupaten Tuban mengalami peningkatan peran dari kelompok dua menjadi kelompok tiga.

Berikut disajikan gambar peranan sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se Jawa Timur tahun 2000 dan 2005.

Gambar 3
Peranan Sektor Industri Kabupaten/Kota Tahun 2000 (%)



Gambar 4
Peranan Sektor Industri Kabupaten/Kota Tahun 2005 (%)



Selain Sektor Industri Pengolahan, yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur adalah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Kegiatan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran ini menyebar keseluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Sejalan dengan naiknya peran Sektor Industri dan sedikit

melambatnya Sektor Pertanian, ternyata Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran mampu bergerak lebih cepat, seolah sektor ini sedikit kebal terhadap krisis.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terdiri dari tiga subsektor yaitu, Subsektor Perdagangan yang mencakup kegiatan pendistribusian produk, baik berasal dari daerah sendiri, luar daerah, maupun luar negeri. Sedangkan Subsektor Hotel mencakup kegiatan penyediaan ruangan/kamar untuk menginap atau lainnya, dan Subsektor Restoran mencakup kegiatan penyediaan makanan dan minuman jadi untuk siap dikonsumsi.

Berkembangnya Sektor Perdagangan, ini sangat dipengaruhi oleh volume barang yang diperdagangkan baik dari dalam maupun luar, sedangkan Subsektor Hotel dipengaruhi oleh banyaknya tamu yang menginap di hotel dan Subsektor Restoran perkembangannya dipengaruhi oleh banyaknya konsumsi makanan jadi di wilayah Jawa Timur.

Tabel 3.4
Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor
Perdagangan, Hotel, dan Restoran Tahun 2000

Peranan (Persen)	Kabupaten/Kota	Jumlah
≤ 9,99	Kab. Pacitan	1
10,00 - 19,99	Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Tuban, Kab. Sampang, Kab. Trenggalek, Kab. Sidoarjo, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Jember, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab. Lumajang	12
20,00 - 29,99	Kab. Pasuruan, Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kab. Bojonegoro, Kab. Banyuwangi, Kab. Tulungagung Kab. Magetan, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Madiun, Kab. Bangkalan, Kab. Lamongan, Kab. Jombang, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Blitar,	17
30,00 - 39,99	Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kab. Nganjuk, Kab. Situbondo, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto	7
≥ 40,00	Kota Batu	1
Jumlah		38

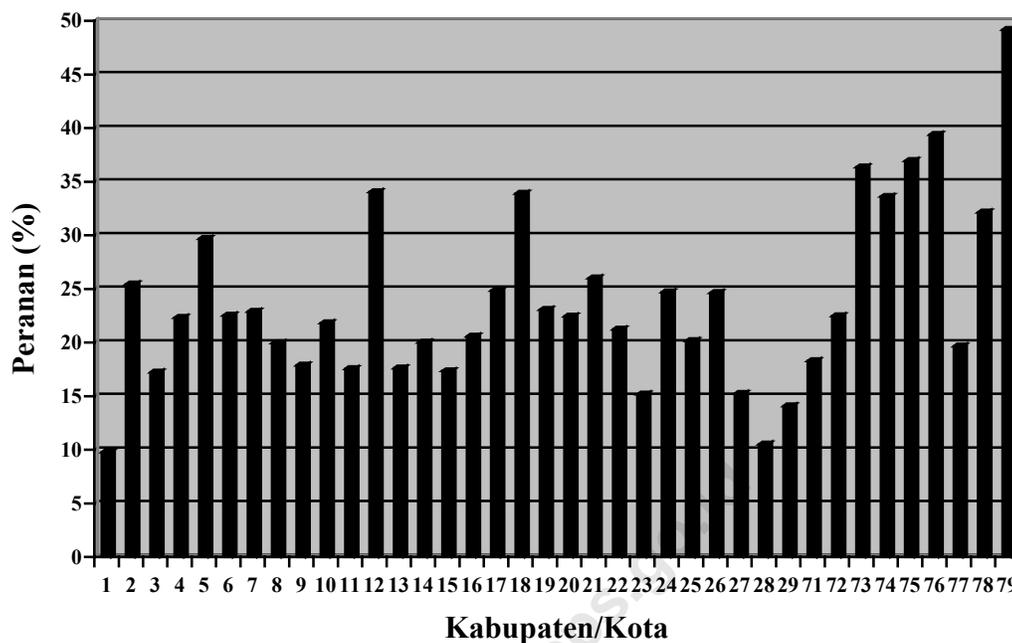
Tabel 3.5
Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor
Perdagangan, Hotel, dan Restoran Tahun 2005

Peranan (Persen)	Kabupaten/Kota	Jumlah
≤ 9,99		-
10,00 - 19,99	Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab. Lumajang, Kab. Trenggalek, Kab. Jember	7
20,00 - 29,99	Kab. Tuban, Kab. Pasuruan, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota Madiun, Kab. Bondowoso, Kota Blitar, Kota Kediri, Kab. Bojonegoro, Kab. Mojokerto, Kab. Malang, Kab. Kediri, Kab. Bangkalan, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Probolinggo, Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi, Kab. Ngawi, Kab. Tulungagung	21
30,00 - 39,99	Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Situbondo, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Nganjuk,	8
≥ 40,00	Kota Mojokerto, Kota Batu	2
Jumlah		38

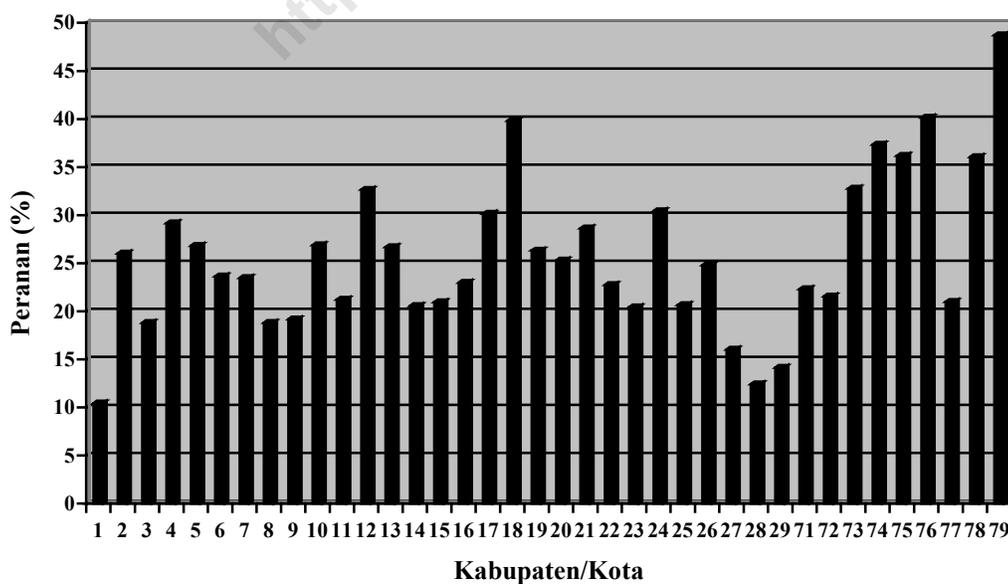
Apabila dibandingkan dengan peranan Sektor lainnya, peranan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran ini cukup merata di setiap kabupaten dan kota, terutama subsektor Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan kegiatan ekonomi yang relatif mudah dimasuki oleh siapa saja.

Dari tabel 3.4 dan 3.5 dapat dilihat peranan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada tahun 2000 peranan terendah sebesar 9,79 % dan tertinggi sebesar 49,17 %. Sedangkan pada tahun 2005 peranan terendah sebesar 10,43 % dan tertinggi sebesar 48,71 %. Berikut disajikan gambar peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran kabupaten/kota se Jawa Timur tahun 2000 dan 2005.

Gambar 5
Peranan Sektor Perdagangan, Hotel, Dan Restoran Kabupaten/Kota
Tahun 2000 (%)



Gambar 6
Peranan Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran Kabupaten/Kota
Tahun 2005 (%)



Sektor terakhir yang menempati tiga sektor utama pada struktur perekonomian di Jawa Timur adalah sektor pertanian. Meskipun peranan sektor pertanian mengalami penurunan posisi tetapi masih ada beberapa kabupaten yang masih merupakan wilayah agraris, dimana perekonomiannya sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertanian. Pada tahun 2000 peran sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 19,74 persen, dan selanjutnya pada tahun 2005 turun menjadi 17,24 persen. Turunnya peran sektor pertanian pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2000 diakibatkan oleh lebih cepatnya pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti Industri Pengolahan, dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran, dibanding sektor pertanian.

Untuk daerah yang masih agraris rata-rata memiliki ciri tersendiri, terutama dalam hal penciptaan PDRB dan percepatan pertumbuhan. Umumnya daerah agraris dalam penciptaan PDRB nya banyak bergantung pada alam, dan rata-rata pertumbuhannya lebih lambat dibanding dengan daerah industri. Berikut disajikan tabel peranan sektor pertanian di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 3.6
Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor
Pertanian Tahun 2000

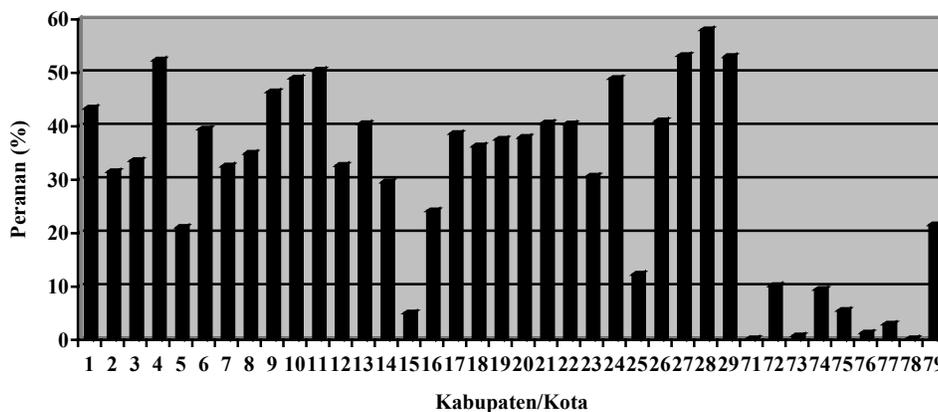
Peranan (Persen)	Kabupaten/Kota	Jumlah
≤ 9,99	Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kab. Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo	8
10,00 - 19,99	Kota Blitar, Kab. Gresik	2
20,00 - 29,99	Kab. Blitar, Kota Batu, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan	4
30,00 - 39,99	Kab. Tuban, Kab. Ponorogo, Kab. Malang, Kab. Situbondo, Kab. Trenggalek, Kab. Lumajang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Jombang, Kab. Kediri	11
≥ 40,00	Kab. Bojonegoro, Kab. Probolinggo, Kab. Ngawi, Kab. Bangkalan, Kab. Pacitan, Kab. Jember, Kab. Lamongan, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Tulungagung, Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan	13
Jumlah		38

Tabel 3.7
Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor
Pertanian Tahun 2005

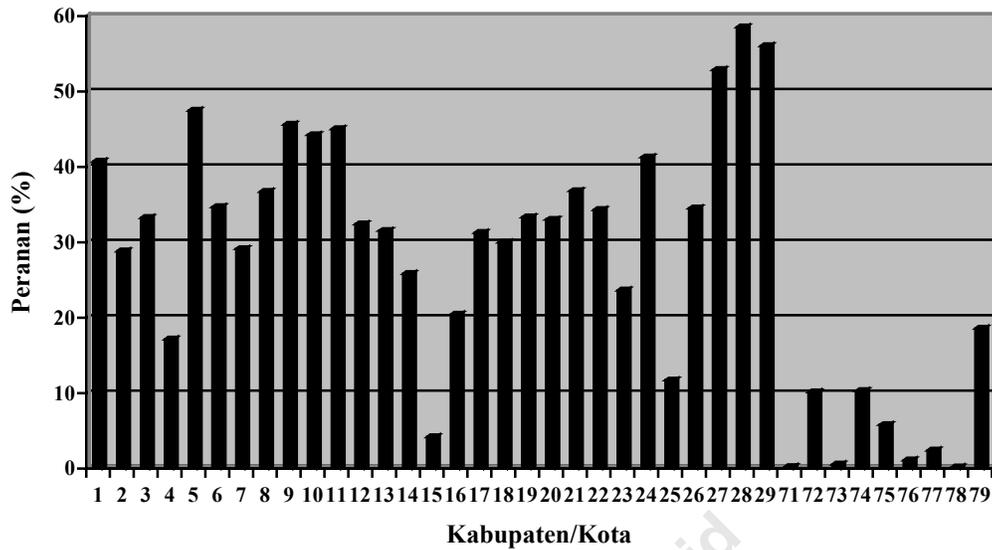
Peranan (Persen)	Kabupaten/Kota	Jumlah
≤ 9,99	Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kab. Sidoarjo, Kota Pasuruan,	7
10,00 - 19,99	Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kab. Gresik, Kab. Tulungagung, Kota Batu	5
20,00 - 29,99	Kab. Mojokerto, Kab. Tuban, Kab. Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kab. Malang, Kab. Nganjuk	6
30,00 - 39,99	Kab. Jombang, Kab. Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Magetan, Kab. Trenggalek, , Kab. Madiun, Kab. Bojonegoro, Kab. Bangkalan Kab. Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Ngawi	11
≥ 40,00	Kab. Pacitan, Kab. Lamongan, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Jember, Kab. Blitar, Kab. Sampang, Kab. Sumenep, Kab. Pamekasan	9
Jumlah		38

Kondisi sumber alam yang tersedia di masing-masing daerah mendukung terbentuknya sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utama di daerah yang bersangkutan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan sektor pertanian untuk daerah padat industri relatif lebih kecil. Berikut disajikan gambar peranan sektor pertanian di kabupaten/kota se Jawa Timur tahun 2000 dan 2005.

Gambar 7
Peranan Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Tahun 2000 (%)



Gambar 8
Peranan Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Tahun 2005 (%)



Selain ketiga sektor tersebut, peranan sektor lain dalam menyumbang PDRB Jawa Timur cukup kecil yaitu rata-rata dibawah 10 %. Pada Tahun 2000 peran sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,10 persen dan pada tahun 2005 terjadi sedikit penurunan menjadi sebesar 2,01 %.

3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala.

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2005 menunjukkan angka yang cukup bervariasi. Seluruh kabupaten/kota mengalami pertumbuhan.

Perekonomian Kota Surabaya sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur, dalam empat tahun terakhir ini sudah mulai ada peningkatan pertumbuhan. Pada tahun 2001

pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya adalah sebesar 4,88 persen. Dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi secara keseluruhan, pada tahun 2002 Perekonomian Kota Surabaya mengalami pertumbuhan sebesar 5,18 persen, pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 5,25 persen, pada tahun 2004 terus meningkat menjadi sebesar 7,34 persen dan pada tahun 2005 menurun sedikit menjadi 7,16 persen. Pertumbuhan Kota Surabaya selama periode ini pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Jawa Timur.

Kota Surabaya sebagai ibukota Propinsi yang mempunyai infrastruktur dan fasilitas lebih lengkap dibanding kota-kota lain di Jawa Timur dalam hal Perdagangan, Industri, Pendidikan dan Maritim. Pada tahun 2005, Sektor Perdagangan tumbuh sebesar 11,64 persen dan Sektor Angkutan sebagai sektor yang erat hubungannya dengan Sektor Perdagangan tumbuh sebesar 7,55 persen. Selain dua sektor tersebut, Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sehingga dapat menyumbang pada pertumbuhan PDRB Kota Surabaya secara signifikan yaitu tumbuh sebesar 9,06 persen.

Wilayah yang mempunyai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2005 adalah Kota Surabaya dengan tumbuh sebesar 7,16 persen, diatas pertumbuhan ekonomi Propinsi. Wilayah lain yang juga mengalami pertumbuhan relatif tinggi adalah Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Batu dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,09 persen, 7,06 persen, 6,87 persen, 6,49 persen, 6,39 persen, dan 6,37 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur selama lima tahun terakhir (tahun 2001 – 2005) masih di pengaruhi oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang mempunyai peranan yang sangat besar selain sektor Industri yaitu tumbuh masing-masing sebesar 8,08 persen, 8,32 persen, 7,92 persen, 9,25 persen, dan 9,15 persen.

Tabel 3.8
Perbandingan Laju Pertumbuhan Dengan Peran Tiga Sektor Utama Terbesar
di Sepuluh Kabupaten Tahun 2001 dan 2005

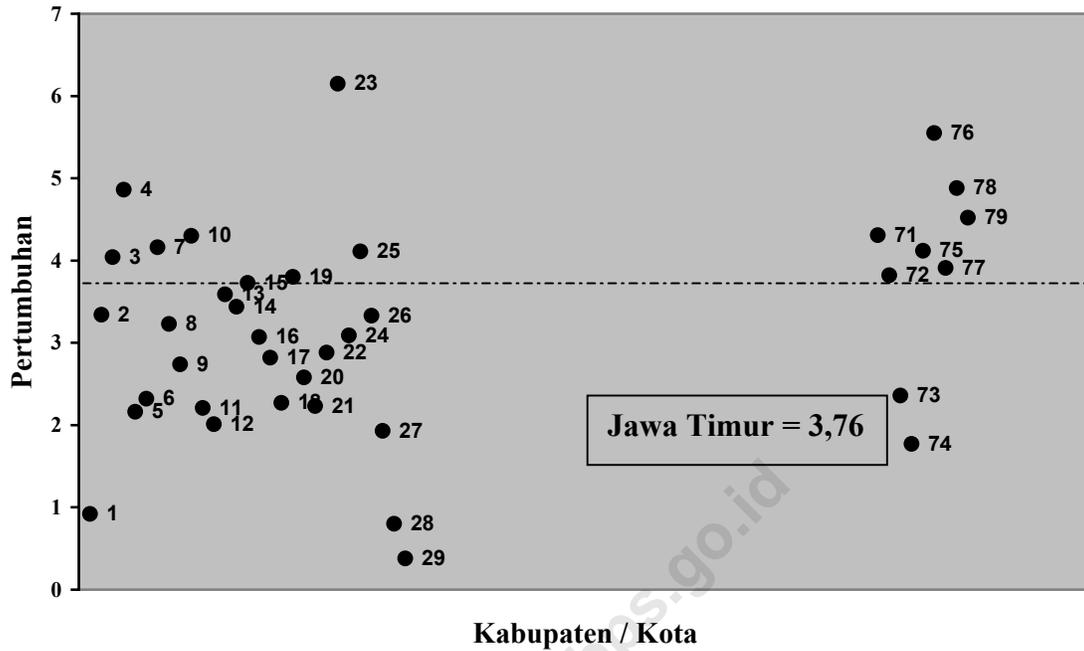
No	Kabup/Kota	Sektor				Sektor		Total Pertumbuhan	
		Sektor Industri	Perdagangan, Hotel & Restr	Perdagangan, Hotel & Restr	Perdagangan, Hotel & Restr	Pertanian	Pertanian	Ekonomi	Ekonomi
		2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
1.	Kab. Tulungagung	5,40	6,47	7,58	8,05	0,91	2,03	4,86	6,11
2.	Kab. Kediri	2,62	3,04	5,42	5,75	0,74	2,87	2,32	4,12
3.	Kab. Malang	3,79	9,17	6,62	7,28	2,24	4,41	4,16	6,11
4.	Kab. Banyuwangi	1,49	6,04	9,05	8,10	3,30	3,93	4,30	5,34
5.	Kab. Situbondo	-0,08	7,33	4,54	7,13	0,47	5,03	2,01	6,06
6.	Kab. Probolinggo	2,48	5,74	8,50	10,97	1,95	1,29	3,59	4,94
7.	Kab. Pasuruan	3,01	9,96	8,65	7,47	-0,34	1,12	3,44	6,36
8.	Kab. Mojokerto	2,40	4,86	7,19	8,86	0,64	4,94	3,07	5,93
9.	Kab. Tuban	6,53	7,50	11,65	10,17	0,90	0,50	6,15	4,99
10.	Kab. Gresik	4,45	6,41	7,66	10,88	1,13	3,20	4,11	7,09
	Jawa Timur	2,35	4,61	8,08	9,15	1,26	3,16	3,76	5,84

Dari sepuluh kabupaten/kota yang peran tiga sektor utamanya terbesar, pada tahun 2005 yang mengalami peningkatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan tahun 2001 adalah Kab. Tulungagung, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto, dan Kab. Gresik, sedang Kabupaten Tuban mengalami penurunan pertumbuhan. Turunnya pertumbuhan pada Kabupaten Tuban disebabkan oleh turunnya Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dan Pertanian. Sektor Industri, Perdagangan, Hotel, dan Restoran serta Pertanian yang mempunyai peranan cukup signifikan ke sembilan daerah mengalami kenaikan pertumbuhan. Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Pasuruan pertumbuhannya mengalami peningkatan walaupun Sektor Perdagangan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan yang cukup tinggi pada Sektor Industrinya. Begitu juga untuk Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan pada Sektor Pertanian, namun pertumbuhannya masih meningkat, karena pada Sektor Industri dan Perdagangan mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

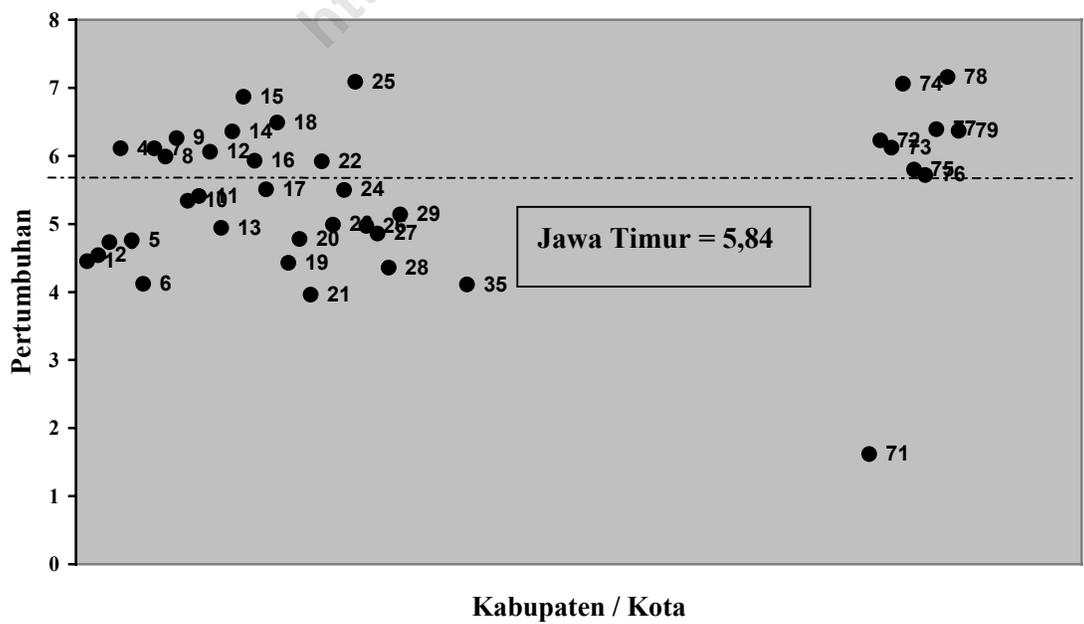
Tabel 3.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Tahun 2001 – 2005 (%)

	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Pacitan	0,92	2,07	2,70	3,09	4,45
2	Kab. Ponorogo	3,34	4,01	3,92	4,08	4,54
3	Kab. Trenggalek	4,04	3,34	2,83	3,47	4,73
4	Kab. Tulungagung	4,86	5,48	4,98	5,69	6,11
5	Kab. Blitar	2,16	3,61	5,02	4,75	4,76
6	Kab. Kediri	2,32	2,52	3,21	4,26	4,12
7	Kab. Malang	4,16	4,30	4,36	5,53	6,11
8	Kab. Lumajang	3,23	3,56	4,10	5,52	5,99
9	Kab. Jember	2,74	4,29	4,28	4,72	6,26
10	Kab. Banyuwangi	4,30	4,80	4,56	4,49	5,34
11	Kab. Bondowoso	2,21	3,21	3,88	4,66	5,41
12	Kab. Situbondo	2,01	4,01	4,73	4,72	6,06
13	Kab. Probolinggo	3,59	4,77	4,46	5,12	4,94
14	Kab. Pasuruan	3,44	4,24	5,17	6,13	6,36
15	Kab. Sidoarjo	3,73	4,49	6,56	6,74	6,87
16	Kab. Mojokerto	3,07	4,09	5,50	7,49	5,93
17	Kab. Jombang	2,82	4,46	4,95	5,17	5,51
18	Kab. Nganjuk	2,27	4,50	4,88	5,17	6,49
19	Kab. Madiun	3,80	3,88	2,08	2,54	4,43
20	Kab. Magetan	2,58	3,34	3,55	4,12	4,78
21	Kab. Ngawi	2,23	2,46	2,37	3,92	3,96
22	Kab. Bojonegoro	2,88	3,75	3,12	4,90	5,92
23	Kab. Tuban	6,15	3,55	3,68	3,85	4,99
24	Kab. Lamongan	3,09	4,14	4,23	4,62	5,50
25	Kab. Gresik	4,11	5,22	5,46	6,06	7,09
26	Kab. Bangkalan	3,33	3,66	3,83	4,62	4,97
27	Kab. Sampang	1,93	3,09	2,83	4,35	4,86
28	Kab. Pamekasan	0,80	3,12	4,19	4,21	4,36
29	Kab. Sumenep	0,38	4,46	3,96	3,62	5,14
71	Kota Kediri	4,31	-3,29	4,35	5,50	1,62
72	Kota Blitar	3,82	7,48	5,56	5,80	6,23
73	Kota Malang	2,36	3,60	4,66	6,32	6,12
74	Kota Probolinggo	1,77	5,20	4,18	5,84	7,06
75	Kota Pasuruan	4,12	5,28	4,61	4,85	5,80
76	Kota Mojokerto	5,55	7,73	5,68	6,01	5,72
77	Kota Madiun	3,91	5,01	4,27	4,24	6,39
78	Kota Surabaya	4,88	5,18	5,25	7,34	7,16
79	Kota Batu	4,52	6,58	6,23	6,35	6,37
	Propinsi Jawa Timur	3,76	3,80	4,78	5,83	5,84

Gambar 9
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 2001



Gambar 10
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 2005



Dari gambar 9 dan 10 terlihat bahwa pada tahun 2001 rata-rata pertumbuhan relatif bervariasi dan menyebar dengan pertumbuhan Jawa Timur, sedang tahun 2005 pertumbuhan relatif tidak bervariasi, dimana daerah kota maupun kabupaten pertumbuhannya cenderung mendekati dengan pertumbuhan Jawa Timur walaupun rata-rata pertumbuhan kota maupun kabupaten banyak yang berada dibawah pertumbuhan Jawa Timur.

3.4 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah, dan bisa digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran. Data yang diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama ini akan sangat dipengaruhi oleh besaran dari kedua variabel tersebut. Sebagai gambaran apabila nilai PDRB besar sedangkan jumlahnya sedikit maka rata-rata PDRB perkapitanya akan menjadi besar. Sebaliknya apabila nilai PDRB kecil, sedangkan jumlah penduduknya banyak, maka PDRB perkapitanya akan menjadi kecil. Oleh karena itu besar kecilnya PDRB perkapita dapat menjadi ukuran kemakmuran suatu daerah, sekalipun data tersebut tidak dapat digunakan langsung sebagai pengukuran pemerataan pendapatan daerah tersebut.

PDRB perkapita di seluruh kabupaten/kota se Jawa Timur pada tahun 2000 sampai dengan 2005 rata-rata menunjukkan angka yang meningkat, bahkan untuk daerah-daerah tertentu menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Untuk melihat rata-rata PDRB perkapita yang diterima oleh penduduk tersebut digunakan penghitungan atas dasar harga berlaku. Berikut adalah tabel yang menyajikan PDRB perkapita di kabupaten/kota yang digolongkan menurut kelas-kelas tertentu.

Tabel 3.10
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2000

PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Kabupaten/Kota	Jumlah
≤ 1,99		-
2,00 - 3,99	Kab. Pamekasan, Kab. Pacitan, Kab. Bondowoso, Kab. Trenggalek, Kab. Sampang, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Bangkalan, Kab. Lamongan, Kab. Madiun, Kab. Pasuruan, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Jember, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang, Kab. Blitar, Kab. Magetan, Kab. Malang, Kota Blitar, Kab. Lumajang, Kab. Situbondo, Kab. Sumenep, Kab. Tuban	24
4,00 - 5,99	Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kab. Mojokerto, Kab. Probolinggo, Kab. Banyuwangi, Kota Batu, Kab. Tulungagung	7
6,00 - 7,99	Kota Probolinggo, Kota Mojokerto	2
≥ 8,00	Kab. Gresik, Kota Malang, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Kediri	5
Jumlah		38

Tabel 3.11
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2005

PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Kabupaten/Kota	Jumlah
≤ 1,99		-
2,00 - 3,99	Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Bondowoso	4
4,00 - 5,99	Kab. Sampang, Kab. Lamongan, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Bangkalan, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kab. Nganjuk, Kab. Pasuruan	9
6,00 - 7,99	Kab. Jember, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang, Kab. Blitar, Kab. Sumenep, Kab. Magetan, Kab. Tuban, Kota Blitar, Kab. Lumajang, Kab. Situbondo, Kab. Malang, Kota Pasuruan, Kab. Banyuwangi	13
≥ 8,00	Kab. Probolinggo, Kab. Mojokerto, Kota Madiun, Kota Batu, Kab. Tulungagung, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kab. Gresik, Kota Malang, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Kediri	12
Jumlah		38

Tabel 3.10 dan 3.11 menggambarkan perpencaran dari PDRB perkapita kabupaten/kota yang distribusinya nampak tidak merata. Pada Tahun 2000 maupun tahun 2005 tidak ada satu pun kabupaten/kota yang PDRB perkapitanya masih dibawah Rp.2.000.000,- pertahun. Selanjutnya untuk wilayah yang PDRB perkapitanya mencapai Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.999.999,- pada tahun 2000 meliputi 24 kabupaten/kota, sedangkan pada tahun 2005 hanya ada 4 kabupaten/kota. Hal ini menandakan bahwa PDRB Perkapita kabupaten/kota se Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Seperti sudah terpotret dengan jelas, bahwa untuk wilayah kota rata-rata PDRB perkapitanya pada tahun 2005 berada diatas Rp. 4.000.000,-, kecuali Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah industri dan perdagangan.

Tabel 3.12
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Yang Rata-Rata
Berada di Atas PDRB Perkapita Jawa Timur

Tahun 2000			Tahun 2005		
No.	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita	No.	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita
1	74 Kota Probolinggo	6.341.804	1	74 Kota Probolinggo	12.202.209
2	76 Kota Mojokerto	6.886.766	2	76 Kota Mojokerto	13.717.273
3	25 Kab. Gresik	9.393.716	3	25 Kab. Gresik	17.985.411
4	73 Kota Malang	11.424.647	4	73 Kota Malang	20.527.353
5	15 Kab. Sidoarjo	11.554.593	5	15 Kab. Sidoarjo	20.840.262
6	78 Kota Surabaya	18.769.687	6	78 Kota Surabaya	38.016.239
7	71 Kota Kediri	69.265.890	7	71 Kota Kediri	134.318.454
Propinsi Jawa Timur		5.739.390	Propinsi Jawa Timur		10.881.694

Untuk daerah yang memiliki PDRB Perkapita terendah adalah Kabupaten Pamekasan, dengan PDRB perkapita tahun 2000 sebesar Rp. 2.011.673,- , lebih rendah dari rata-rata PDRB perkapita Jawa Timur yang mencapai Rp. 5.739.390,- pada tahun yang sama. Sedangkan daerah yang memiliki PDRB perkapita tertinggi adalah Kota Kediri, dengan PDRB perkapita mencapai Rp. 69.265.890,-. Pada tahun 2005 posisi PDRB Perkapita Kabupaten Pamekasan mengalami sedikit peningkatan sehingga posisi PDRB Perkapita terendah bukan ditempati Kabupaten Pamekasan lagi tetapi diganti dengan Kabupaten Trenggalek, dengan PDRB Perkapita sebesar Rp. 3.587.325,50,- , sedangkan rata-rata Jawa Timur sudah mencapai Rp. 10.881.694,- . Kota Kediri dengan

andalan industri rokoknya pada tahun 2005 tetap memiliki PDRB Perkapita tertinggi sudah mencapai Rp. 134.318.454,-.

Untuk daerah yang rata-rata PDRB perkapitanya tinggi dan melebihi PDRB perkapita Jawa Timur adalah daerah kota dan daerah-daerah yang rata-rata peranan sektor industri dan perdagangannya tinggi, seperti Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.13
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Yang Rata-Rata Berada di Bawah PDRB Perkapita Jawa Timur

Tahun 2000			Tahun 2005		
No.	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita	No.	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita
1	28 Kab. Pamekasan	2.011.673	1	3 Kab. Trenggalek	3.587.327
2	1 Kab. Pacitan	2.039.996	2	1 Kab. Pacitan	3.652.074
3	11 Kab. Bondowoso	2.184.023	3	28 Kab. Pamekasan	3.745.643
4	3 Kab. Trenggalek	2.290.081	4	11 Kab. Bondowoso	3.957.174
5	27 Kab. Sampang	2.350.863	5	27 Kab. Sampang	4.039.501
6	21 Kab. Ngawi	2.536.763	6	24 Kab. Lamongan	4.631.313
7	2 Kab. Ponorogo	2.565.118	7	21 Kab. Ngawi	4.644.352
8	26 Kab. Bangkalan	2.691.208	8	2 Kab. Ponorogo	4.689.332
9	24 Kab. Lamongan	2.720.563	9	26 Kab. Bangkalan	4.902.731
10	19 Kab. Madiun	2.867.207	10	6 Kab. Kediri	5.267.845
11	14 Kab. Pasuruan	3.097.958	11	19 Kab. Madiun	5.507.733
12	18 Kab. Nganjuk	3.134.355	12	18 Kab. Nganjuk	5.757.521
13	6 Kab. Kediri	3.192.223	13	14 Kab. Pasuruan	5.948.450
14	9 Kab. Jember	3.221.655	14	9 Kab. Jember	6.179.470
15	22 Kab. Bojonegoro	3.269.024	15	22 Kab. Bojonegoro	6.346.003
16	17 Kab. Jombang	3.470.731	16	17 Kab. Jombang	6.675.166
17	5 Kab. Blitar	3.495.199	17	5 Kab. Blitar	6.684.890
18	20 Kab. Magetan	3.514.919	18	29 Kab. Sumenep	6.701.773
19	7 Kab. Malang	3.737.671	19	20 Kab. Magetan	6.780.060
20	72 Kota Blitar	3.834.831	20	23 Kab. Tuban	7.115.279
21	8 Kab. Lumajang	3.851.701	21	72 Kota Blitar	7.123.422
22	12 Kab. Situbondo	3.867.098	22	8 Kab. Lumajang	7.265.515
23	29 Kab. Sumenep	3.956.498	23	12 Kab. Situbondo	7.460.844
24	23 Kab. Tuban	3.965.322	24	7 Kab. Malang	7.566.697
25	75 Kota Pasuruan	4.012.125	25	75 Kota Pasuruan	7.839.443
26	77 Kota Madiun	4.203.753	26	10 Kab. Banyuwangi	7.944.823
27	16 Kab. Mojokerto	4.260.775	27	13 Kab. Probolinggo	8.055.307
28	13 Kab. Probolinggo	4.356.774	28	16 Kab. Mojokerto	8.094.738
29	10 Kab. Banyuwangi	4.481.320	29	77 Kota Madiun	8.928.043
30	79 Kota Batu	4.712.747	30	79 Kota Batu	8.963.003
31	4 Kab. Tulungagung	5.107.631	31	4 Kab. Tulungagung	9.764.665
Propinsi Jawa Timur		5.739.390	Propinsi Jawa Timur		10.881.694

Tabel : 3.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)

KABUPATEN PACITAN						
Sektor/Subsektor	2000	2001	2002	2003	2004*)	2005**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	468.291,00	531.768,29	582.592,74	641.661,05	696.639,57	812.010,62
1.1. Tanaman Bahan Makanan	321.249,48	353.919,17	378.429,08	398.301,98	414.256,87	446.776,50
1.2. Tanaman Perkebunan	74.093,26	82.811,22	92.989,23	110.145,77	125.429,82	171.814,89
1.3. Peternakan	60.625,93	78.111,12	89.102,98	104.995,61	120.962,78	145.619,60
1.4. Kehutanan	448,90	612,81	679,26	562,34	480,87	519,97
1.5. Perikanan	11.873,43	16.313,96	21.392,19	27.655,35	35.509,24	47.279,65
2. Pertambangan dan Penggalian	68.737,76	88.882,85	104.661,46	114.666,38	122.994,22	144.550,41
2.1. Pertambangan Migas	-	-	-	-	-	-
2.2. Pertambangan Non-migas	-	-	-	-	-	-
2.3. Penggalian	68.737,76	88.882,85	104.661,46	114.666,38	122.994,22	144.550,41
3. Industri Pengolahan	37.652,86	42.656,82	49.656,88	57.604,97	64.800,29	81.183,87
3.1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	21.676,02	24.748,75	29.093,88	33.886,08	38.461,88	50.518,07
3.2. Tekstil, Barang dari Kulit, dan Alas kaki	2.829,21	3.168,52	3.897,96	4.776,56	5.734,42	6.937,65
3.3. Barang dari kayu dan Hasil Hutan Lainnya	5.333,59	6.600,91	7.704,95	9.069,49	10.015,89	11.947,02
3.4. Kertas dan Barang Cetak	299,85	298,55	315,49	371,10	459,76	494,19
3.5. Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet	141,54	165,43	178,55	188,38	225,51	292,35
3.6. Semen dan Barang Galian bukan logam	6.451,08	6.638,66	7.275,53	8.002,51	8.504,73	9.364,38
3.7. Logam Dasar Besi dan Baja	-	-	-	-	-	-
3.8. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya	58,28	64,72	71,91	82,25	94,49	110,87
3.9. Barang Lainnya	863,28	971,29	1.118,61	1.228,60	1.303,62	1.519,34
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.500,49	5.458,58	8.503,88	12.008,27	17.416,12	20.360,12
4.1. Listrik	4.043,37	4.914,97	7.717,96	10.827,60	15.895,72	18.726,56
4.2. Gas kota	-	-	-	-	-	-
4.3. Air Bersih	457,12	543,61	785,92	1.180,67	1.520,40	1.633,56
5. Konstruksi	74.416,05	78.622,96	85.332,32	91.112,04	98.720,09	108.231,93
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	105.818,60	119.520,37	138.109,70	155.353,81	174.301,60	208.015,08
6.1. Perdagangan	74.359,48	85.010,37	97.500,48	112.244,26	126.341,80	151.466,28
6.2. Hotel	429,07	436,41	460,23	508,39	594,18	634,81
6.3. Restoran	31.030,04	34.073,59	40.148,99	42.601,16	47.365,62	55.913,99
7. Pengangkutan dan Komunikasi	57.645,68	68.331,56	79.969,15	92.781,70	95.816,42	112.988,29
a. Angkutan	55.394,15	65.727,39	76.337,41	88.758,75	91.739,34	108.324,61
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	53.609,33	63.891,46	74.250,67	86.370,97	89.188,29	105.403,14
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-
4. Angkutan Penyeberangan	-	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	1.784,82	1.835,93	2.086,74	2.387,78	2.551,05	2.921,47
b. Komunikasi	2.251,53	2.604,17	3.631,74	4.022,95	4.077,08	4.663,68
1. Pos dan Telekomunikasi	2.097,11	2.324,17	3.041,71	3.480,85	3.560,97	4.141,39
2. Jasa Penunjang Komunikasi	154,42	280,00	590,03	542,10	516,11	522,29
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	86.480,99	95.714,75	101.965,28	109.052,66	118.234,54	135.021,13
8.1. Bank	11.142,68	12.304,78	11.991,12	12.481,04	12.751,44	15.165,05
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	16.831,82	19.045,73	21.167,08	23.169,83	25.893,04	28.698,01
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-	-
8.4. Sewa Bangunan	54.920,57	60.244,04	64.438,14	68.695,13	74.641,47	85.653,43
8.5. Jasa Perusahaan	3.585,91	4.120,19	4.368,94	4.706,67	4.948,59	5.504,64
9. Jasa-Jasa	177.231,93	203.829,20	233.417,54	269.490,67	299.538,66	372.218,85
a. Pemerintahan umum	132.537,52	152.572,38	175.684,56	202.173,00	219.442,17	273.718,10
b. Swasta	44.694,42	51.256,81	57.732,98	67.317,67	80.096,49	98.500,74
1. Jasa Sosial Masyarakat	8.992,51	9.383,88	10.595,18	11.084,68	11.606,66	12.937,30
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	1.719,74	2.716,64	4.501,44	6.947,85	11.601,22	17.260,51
3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	33.982,17	39.156,30	42.636,35	49.285,14	56.888,61	68.302,94
Produk Domestik Regional Bruto	1.080.775,34	1.234.785,38	1.384.208,95	1.543.731,56	1.688.461,51	1.994.580,30
PDRB Jawa Timur	202.830.063,02	233.881.585,29	267.157.716,58	300.609.857,97	341.065.251,33	403.392.350,76

Keterangan : * Angka Diperbaiki

** Angka Sementara